

# Mencermati Fenomena Kebebalan Sosial sebagai Ancaman Persatuan Bangsa

*Pinky Saptandari*  
(Universitas Airlangga)

## Pendahuluan

Secara tidak disadari masyarakat telah mengembangkan sikap acuh-tak acuh, tak peduli, cenderung lamban, melawan otoritas, tidak mau diatur, bersikap masa bodoh, yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai sikap bebal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata 'bebal' sebagai 'sukar mengerti; tidak cepat menanggapi sesuatu (tidak tajam pikiran); bodoh'. Sedangkan 'kebebalan' sebagai 'kebodohan' (KBBI 1989). Persoalannya bila sikap bebal ini dilakukan banyak orang, secara berulang-ulang dan terus menerus, apakah fenomena empirik ini kemudian dapat dikategorikan sebagai keadaan di mana masyarakat sedang mengalami proses kebebalan sosial? Secara hipotesis, keadaan ini menggelitik wacana pemikiran: kebebalan ataukah pembetulan?

Untuk mencermatinya, rasanya relevan bila diawali dengan mengutip pernyataan Erich Fromm yang secara khusus menyatakan, bahwa: "Sejak abad ke 19 sampai sekarang telah terjadi pertambahan kebodohan yang menonjol, saya menyebutnya sebagai kebodohan yang dipertentangkan dengan akal-budi dan bukan dengan

intelegensi. Sebab hampir tiap orang sudah membaca koran sebagai santapan harian, namun tak ada pemahaman akan makna peristiwa politik yang sesungguhnya sedang mengancam, karena intelegensi kita membantu memproduksi senjata-senjata, dimana akal budi kita tak mampu mengendalikannya". (Pengantar Editor: Idi S. Ibrahim dan Dedy D. Malik 1997).

Kebebalan telah menjadi fenomena yang berkembang luas di masyarakat. Ungkapan kebebalan, memang, berlangsung secara sporadis, namun meluasnya ungkapan bebal - baik secara geografis maupun tema yang diajukan - seringkali mengusik wacana yang mengesankan sesuatu situasi yang berjalan secara sistemik dan hegemonik. Kebebalan telah, dan sedang, diungkapkan dalam bentuk-bentuknya yang ekstrim. Dari bentuknya yang ekstrim sangat keras sampai dengan bentuk yang ekstrim lemah. Namun demikian, apa dan bagaimana pun bentuknya, ungkapan-ungkapan sikap bebal tidaklah bermanfaat di dalam suasana dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berbenah diri menuju "Indonesia Baru".

## Mengapa pembetulan menjadi suatu gejala umum?

Pemahaman atas romantisme esensi kebudayaan pada sejumlah suku bangsa di Indonesia menjadi tampak terseok-seok menganalisis darimana datangnya sikap bebal itu tumbuh dan berkembang. Misalnya, secara stereotipikal, kebudayaan Jawa mengenal nilai-nilai yang seringkali dipergunakan sebagai acuan ideal seperti konsep hormat, rukun, nrimo, harmoni, gotong royong, dan lain-lain. Demikian pula pada kebudayaan Bugis dan Makasar dikenal nilai harga diri yang disebut dengan siri. Kalau ramah-tamah serta beberapa sikap positif menjadi nilai sosial dan ungkapan kebudayaan pada beberapa suku bangsa di Indonesia, kapankah sikap bebal tersebut muncul? Proses kebebalan yang terjadi selama ini, tentunya, dapat dibedakan pada ungkapan masyarakat secara umum dengan ungkapan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu sendiri. Demikian pula, ungkapan kebebalan pada masyarakat yang mengalami proses marginalisasi, tentu berbeda pula dengan ungkapan yang dimunculkan pada kebebalan aparatur birokrasi.

Pada masyarakat yang mengalami diskriminasi, terpinggirkan, barangkali sikap bebal merupakan ekspresi keputus-asaan, ketidak-berdayaan, melarikan diri dari kenyataan, bentuk-bentuk perlawanan yang tidak terselubung lagi, atau juga ungkapan kebrutalan yang memiriskan nurani. Pada sisi yang lain, kalau sikap bebal tersebut muncul dari kalangan aparatur birokrasi, petugas pemerintah, abdi negara yang menjalankan roda pemerintahan, sikap bebal lebih mengesankan sikap ataupun tindakan "saya lebih mengerti dan lebih mampu dari pada anda". Keunggulan kekuasaan menjadi acuan dengan dalih "mumpung bisa", "senyampang berkuasa". Arogansi kekuasaan seringkali lebih kuat mengedepan, ketimbang

keinginan untuk memberi layanan sebagaimana tercantum dalam Sapta Prasetya Korpri yang - masih tetap -- diteriakkan pada setiap upacara bulanan tanggal tujuh belas.

Proses pembebalan yang berjalan terus-menerus tentu akan berakibat negatif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat, bahkan boleh jadi tatanan sosial masyarakat mengalami kemandegan atau kelumpuhan. Diduga bahwa proses pembebalan sosial secara akumulatif memberikan dampak negatif pada keutuhan bangsa yang majemuk ini. Setidaknya akan berkembang sikap bertahan yang negatif, yang lebih berorientasi pada diri sendiri atau kelompok daripada mempertimbangkan keutuhan bangsa.

Gejala yang cenderung membenarkan hipotesis tersebut, secara acak, dapat diamati pada berbagai kejadian yang terjadi di tanah air belakangan ini. Beberapa yang dapat dipakai contoh aktual, adalah sebagai berikut:

- Perkelahian atau tawuran yang tak kunjung usai antara kelompok masyarakat di daerah Mataraman Jakarta; yang menurut pemberitaan media ibukota (Kompas 15 Juli 2000) sudah menjadi gangguan yang membuat muak warga di daerah tersebut. Dengan sumber tawuran yang tak pernah jelas sampai hari ini, kelompok yang berseteru itu mengembangkan keberingasan tanpa memikirkan resiko bagi warga lainnya .
- Meletusnya kasus kerusuhan di Poso, yang mengakibatkan 16.000 pengungsi terancam kelaparan, yang bila tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya dampak sosial baru (Kompas, 15 Juli 2000).
- Sulitnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrasi; yang dikecam di mana-mana sebagai salah satu penyebab hancurnya negara, malah mengesankan merebak.
- Perilaku dan moralitas elite penguasa kian tak terkendali, sikap sebagai negarawan yang seharusnya menunjukkan integritas akal-budi dan kecerdasan budi-pekerjanya justru menunjukkan perilaku dan moralitas yang rendah, lamban dan tidak mampu mengatasi permasalahan bangsa karena sibuk mengurus kepentingannya sendiri.

Potensi konflik akibat munculnya fenomena kebebalaan patut memperoleh perhatian bersama, terutama untuk melihat apakah masih relevan simbol persatuan Bhineka Tunggal Ika? Masih dapat dirumuskankah solusi jangka pendek yang dapat mencegah perpecahan bangsa?

Tulisan ini untuk mengkaji kebebalaan sosial yang saat ini cenderung menjadi suatu fenomena yang muncul secara sporadis namun hampir secara bersamaan dapat dijumpai dimana-mana; di hampir setiap komunitas dalam berbagai tingkatan, dalam semua bidang kehidupan. Dan tentu saja kebebalaan atau proses pembebalan dapat dijumpai pada masyarakat secara umum, hingga kelompok tertentu seperti

pada birokrasi pemerintahan, para intelektual, para elite politik, dan lain-lain. Bagaimanakah kontribusi watak bebal ini terhadap persatuan bangsa yang terkoyak disana-sini? Apa yang sedang - dan akan -- terjadi pada bangsa ini sehingga yang menonjol adalah potensi konflik dan kecenderungan watak yang bebal?

### Masyarakat majemuk: peluang ataukah ancaman?

Kemajemukan suatu masyarakat seringkali diabaikan dalam pembangunan bangsa. Ada anggapan apabila suatu bangsa telah lahir, seolah-olah masyarakat itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mendukung suatu tradisi dan kebudayaan yang sama secara otomatis. Orang cenderung mengabaikan adanya kemungkinan pengelompokan-pengelompokan sosial di dalamnya, yang disamping membantu kelancaran bermasyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan masalah sosial (S. Budhisantoso 1997). Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika pergolakan sosial akibat interaksi antara suku dan golongan dapat memicu adanya ketegangan dan pertentangan antar mereka. Hubungan antar-masyarakat yang mempunyai latar belakang nilai-nilai kebudayaan yang berbeda-beda, melahirkan perbedaan kepentingan yang tidak selalu mulus penyelesaiannya dan berpotensi memicu konflik.

Kesan adanya dominasi suku bangsa tertentu di mana tokoh politik yang sedang berkuasa berasal, seringkali memancing kecemburuan. Kecemburuan sosial dengan sangat mudah disulut, yang dapat merangsang rasa tidak puas pada mereka yang merasa terdominasi. Istilah-istilah yang belakangan ini muncul dengan istilah tirani minoritas, misalnya, menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu berkaitan dengan kekuatan mayoritas. Muncul juga istilah tirani kognitif, yang telah mempengaruhi fungsi media-massa, yang justru mengangkat keretakan psiko-sosial masyarakat sebagai komoditi (Latif & Idi S. Ibrahim 1997).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil atau dampak kontak kebudayaan pada tingkat masyarakat maupun individual menunjukkan respon psikologis yang berbeda-beda. S. Bochner, 1986 (Yusman Yusuf 1991) membuat tabel dengan variabel respons, tipe, afiliasi ganda anggota kelompok, pengaruh antara individu, serta pengaruh atas masyarakat.

Apabila respons yang dimunculkan adalah menolak kebudayaan asli dan merangkul kebudayaan kedua, maka tipe yang muncul adalah tipe passing; pengaruh atas individu adalah kehilangan identitas etnik, mengejek diri sendiri, sedangkan pengaruh atas masyarakat adalah asimilasi, dan erosi kultural. Apabila responnya adalah menolak kebudayaan kedua dan melebih-lebihkan budaya pertama yang asli, maka tipe-nya adalah *chauvinistic*; pengaruh atas individu adalah nasionalisme, dan rasisme; sedangkan efek atas masyarakat adalah timbulnya friksi antara kelompok. Apabila responnya adalah terombang-ambing antar kedua budaya, tipe-nya marginal; pengaruh atas individu adalah

konflik identitas, bingung, membutuhkan kompensasi; sedangkan pengaruhnya atas masyarakat adalah reformasi dan perubahan sosial.

Penelitian terhadap masyarakat multi-etnik, sangat signifikan sebagai usaha untuk membantu proses penyejahteraan masyarakat serta sebagai upaya untuk meredakan ketegangan-ketegangan hubungan antara suku, pendapat ini dinyatakan oleh Koentjaraningrat, seraya mengutip beberapa penelitian penting yang telah dilakukan beberapa antropolog tentang berbagai hal. Misalnya penelitian Soewarsih Warnaen tentang stereotipe etnik yang dianut oleh warga dari suatu suku bangsa yang dilakukan pada murid-murid sekolah di Jakarta. Penelitian tentang tumbuhnya identitas etnik yang dilakukan K. Verdery, di antara suku-bangsa Jerman, Hongaria, dan Rumania, di Republik Rumania (Koentjaraningrat, 1988). Penelitian tentang watak dan proses struktur kepribadian tipikal suatu bangsa, telah dilakukan sejak perang dunia ke II, dimotori oleh Ruth Benedict dan Margaret Mead. Berbagai watak bangsa diteliti, mulai dari watak orang Amerika Serikat, watak orang Jepang, watak orang India, dan watak orang Bali (Danandjaja, 1988). Tujuan penelitian watak bangsa adalah untuk lebih memahami kepribadian lawan, kawan, dan bangsa sendiri dalam masa perang. Sudahlah tentu, hasil-hasil penelitian semacam itu bila dikembangkan akan dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bersangkutan.

Bagaimana realita konflik antara etnik yang berkembang di Indonesia? Ignas Kleiden (1999) menyatakan bahwa masalah konflik antara etnik di Indonesia adalah masalah yang lebih banyak berhubungan kebijaksanaan pemerintah. Dan konflik antara etnik, bukan semata-mata masalah etnik, melainkan lebih merupakan hubungan kekuatan ekonomi-politik. Hampir semua kepustakaan mengenai akulturasi di Indonesia berkesimpulan, fenomena akulturasi pada orang Indonesia adalah juga krisis sosial (Danandjaja, 1988). Bila proses untuk mencapai kemajuan selalu erat kaitannya dengan krisis sosial, maka tak mengherankan apabila selalu muncul perilaku-perilaku menyimpang yang muncul akibat ketidakmampuan penyesuaian diri (*maladjustment*). Hildred Geertz menemukan perilaku latah pada perempuan Jawa yang merupakan suatu keadaan kebudayaan yang mendukung ketidak-beresan kepribadian dalam situasi perubahan masyarakat. Proses perubahan masyarakat juga telah menimbulkan apa yang disebut dengan revolusi identitas, yaitu perubahan mendasar dimana batas-batas antar kelompok yang sebelumnya bersifat lunak kini mengeras dan membentuk batas-batas simbolik yang tak ternegosiasikan. Pertanyaannya adalah: mengapa batas-batas kelompok semakin lama semakin mengeras? Sekurangnya ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan, yakni (Rochman Achwan, 1999):

1. Ketidakmampuan institusi negara menegakkan hukum

dan ketertiban yang bersumber pada patahnya legitimasi aparat penegak hukum.

2. Sebagian besar pemimpin politik cenderung bukan menyuarakan kepentingan bangsa, melainkan kepentingan kelompok kecil yang sempit, yang memunculkan ironi reformasi.
3. Deprivasi ekonomi luarbiasa yang diderita oleh sebagian besar masyarakat.

Ketiga faktor inilah yang mendorong Indonesia kini berada dalam jurang revolusi identitas. Kepercayaan (*trust*) mengalami keretakan, sehingga dengan mudah orang menyebutnya dengan terjadinya krisis kepercayaan.

Kemajemukan bisa menjadi ancaman atau peluang tergantung bagaimana kita menempatkan kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan lokal setiap daerah mempunyai peran sebagai pedoman tingkahlaku bagi anggotanya. Semestinya tiga wujud kebudayaan: (i) kebudayaan sebagai pedoman tata kelakuan, (ii) kebudayaan sebagai kelakuan, dan (iii) kebudayaan sebagai wujud materi bisa menjadi pemersatu, sebagai perekat bangsa dan bukan sebaliknya sebagai sumber perpecahan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana banyak dipahami, merupakan suatu bentuk kontrak sosial antar berbagai elemen masyarakat. Sebuah kontrak yang harus menyiratkan suatu kondisi kesetaraan dalam semangat kemitraan. Kontrak sosial antar pelaku pembangunan (entah kenapa sekarang ini biasa disebut pula dengan istilah *stakeholder*), harus mampu mewujudkan suatu masyarakat yang setara dan berkeadilan. Realita menunjukkan bahwa selama ini masyarakat sipil menjadi penonton, menjadi obyek eksploitasi dari pemegang kekuasaan, sehingga rakyat jadi bodoh karena dibodohkan. Tidak ada kontrak sosial, tidak ada kesepakatan yang sifatnya saling 'menguntungkan'. Program-program pembangunan tidak dikonsultasikan pada penerima manfaat, ia datang sebagai program tiban yang semuanya ditentukan "dari atas".

### Sindrom marginal dan keterkejutan budaya

Orang-orang yang tergolong mengalami sindrom marginal merupakan orang yang terombang-ambing, tidak bisa menentukan dan menjatuhkan pilihan terhadap suatu budaya. Pribadi ataupun kelompok yang mengalami marginalisasi biasanya mengalami konflik dan tidak menutup kemungkinan mengalami apa yang disebut dengan keterkejutan budaya (*culture shock*). Sebuah istilah yang pertamakali diperkenalkan oleh Oberg (Yusuf, 1991), dikatakan bahwa, paling tidak terdapat enam aspek keterkejutan budaya, yaitu:

1. Ketegangan yang disebabkan oleh usaha yang menghendaki kebutuhan akan penyesuaian (adaptasi) psikologis.
2. Merasa hilang dan perasaan renjana yang dirampas dari perhatian teman-teman, status, profesi, dan hak milik.
3. Merasa ditolak dan atau dibuang oleh anggota-anggota kebudayaan baru.

4. Bingung dalam peran, harapan peran, nilai-nilai, rasa, dan identitas diri.
5. Guncangan, cemas, sama-sama menjadi benci, berang, setelah sadar bahwa kebudayaan itu berbeda-beda,
6. Impotensi perasaan yang disebabkan ketidak mampuan mengatasi lingkungan baru.

Istilah keterkejutan budaya ini kemudian diikuti oleh ahli lain yang menggunakan istilah lain, namun masih bertolak dari konsep keterkejutan budaya. Misalnya Guthrie (1975) yang menggunakan istilah kelelahan budaya (*culture fatigue*). Smalley (1963) menggunakan istilah keguncangan bahasa (*language shock*). Byrnes (1966) dengan istilah keguncangan peran (*role shock*). Bal-Rokeach (1973) menggunakan istilah perembesan ambiguitas (*pervasive ambiguity*).

Masihkan konsep keterkejutan budaya ini relevan masa kini? Setidaknya enam aspek keterkejutan budaya yang dikenalkan oleh Oberg tersebut dapat dipakai untuk memotret persoalan yang dihadapi bangsa ini, dan nampaknya beberapa di antaranya masih relevan bila dipakai untuk menganalisis kondisi yang sedang terjadi pada bangsa kita..

Paling tidak kondisi yang ada saat ini melahirkan citra masyarakat yang serba paradoks. Masyarakat mengecam keras materialisme, tetapi di satu sisi pola hidup konsumerisme dan hedonisme semakin menguat. Masyarakat merindukan kebebasan individual dan merindukan tercapainya perjuangan HAM, pada saat yang sama, seringkali, para pejuang HAM telah menampilkan sikap yang otoriter Peran media dalam penyebaran paradoks telah dapat menjadi suatu implikasi serius. Media massa menjadi faktor pendorong munculnya kebangkitan etnisitas, kelompok-kelompok eksklusif dan fundamentalisme, tetapi juga berperan penting dalam kebebasan berpendapat dan menyiarkan gerakan revivalis untuk mengukuhkan pemujaan identitas dirinya. Dibalik janji-janji pluralisme, kebebasan, dan integrasi sosial, media juga menyimpan keraguan, kekerasan, dan disintegrasi sosial (Latif Y.dan Idi S. Ibrahim, 1997).

#### **Potret kebalan sosial dalam masyarakat**

Sebenarnya bagaimanakah potret bangsa yang sedang mengalami proses kebalan sosial? Kebalan itu sendiri merupakan akibat dari suatu proses interaksi yang membuahkan konflik, atau, hasil dari suatu keterkejutan budaya yang dialami masyarakat, ataukah memang merupakan watak bangsa, yang baru muncul aslinya ketika ada pemicunya? Bagaimana proses pembalikan tersebut berjalan. Faktor-faktor apa saja yang secara hipotetis dapat ditunjukkan memberi kontribusi atas semakin maraknya sifat bebal di kalangan masyarakat?

Ekspresi dan bentuk kebalan yang dapat dijumpai dalam masyarakat ada bermacam-macam. Kebalan pada masyarakat marginal, yang mengalami proses pemiskinan, dan lemah dalam akses dan kontrol terhadap sumber, tentu berbeda dengan kebalan yang terjadi pada para pejabat

negara. Bentuk-bentuk kebalan yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di sekitar kita maupun dari media massa.

Jika saja perilaku berlalu-lintas dapat dipakai sebagai cerminan kehidupan bangsa, betapa sangat gamblangnya sifat bebal tersebut dapat dijumpai. Ketika lampu lalu-lintas mati, yang terjadi justru saling mendahului, membuat ruwet dan macet tanpa ada upaya untuk saling mengalah. Ironinya petugas yang berwenang memilih tidak muncul di saat keruwetan semakin menjadi-jadi. Kemacetan lalu-lintas bukan karena ketidak-mengertian masyarakat bagaimana seharusnya menyikapi rambu-rambu lalu-lintas, tetapi merupakan cerminan sikap yang tak mau tahu, tidak menyadari adanya kepentingan umum yang terganggu karena mau menang sendiri.

Pada tataran politik, para politisi saling bertikai dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa menyadari bahwa kondisi bangsa sudah semakin parah. Arogansi kekuasaan telah membutakan mata hati mereka. Arogansi kekuasaan muncul juga dalam wujud perangkat kelembagaan. Lihat saja sisa otoriterisme dalam wujud lembaga yang menjalankan fungsi "pembinaan politik" terhadap rakyat. Lembaga Bakorstanas/da dan lembaga Litsus, dan lembaga Dinsospol/Kansospol. Kata pembinaan politik mengandung makna bahwa rakyat secara politik dianggap cacat, tidak mampu, serta tidak dapat dipercaya, dengan demikian harus dibina (Haryadi, 2000). Pada kenyataannya kekuasaan yang dimiliki aparat yang menangani lembaga-lembaga itu kemudian disalahgunakan untuk memperdayai rakyat. Coba simak surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian, surat keterangan yang dikeluarkan lembaga Litsus, bagaimana bentuk wewenang yang dimiliki sebuah lembaga pemerintah atas diri pribadi rakyatnya, sehingga merasa berhak untuk mengeluarkan surat layak atau tidak-layak sebagai manusia yang diwujudkan dengan selebar surat keterangan kelakuan baik? Kenal saja tidak, bertemu saja tidak pernah, bisa memberikan keterangan kelakuan baik. Nah bila sudah demikian, siapa yang bebal? Lebih parah lagi akhirnya surat-surat tersebut kemudian menjadi komoditi, lahan untuk mencari tambahan uang dengan alasan klasik, gaji tidak cukup.

Di lingkungan kaum terdidik juga dapat dengan mudah kita jumpai fenomena kebalan. Makin banyak orang yang berpendidikan, makin banyak pula orang yang melakukan pelanggaran. Pengetahuan yang diperoleh justru dipergunakan untuk mensiasati lubang-lubang peraturan. Wilayah kelabu (*grey area*) telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Aturan yang telah disepakati bersama, yang seringkali juga ditulis besar-besar berikut sanksinya, pada kenyataannya justru sering dilecehkan.

Sering kita lihat papan pengumuman tentang dilarang membuang sampah berikut sanksinya. Boleh dikatakan bahwa hampir di semua tempat yang diberi tanda larangan

buang sampah itu justru jadi tempat pembuangan sampah. Ironinya masyarakat tidak terusik, dan aparat juga mendiamkan saja seolah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Keheranan justru baru muncul ketika pada lokasi di mana papan peringatan untuk tidak buang sampah ada, dan disitu benar-benar tidak ada sampah yang dibuang. Dengan logika yang seringkali dibalik-balik, jangan-jangan justru kondisi itu dianggap salah sasaran pemasangan papan pengumuman. Contoh lain adalah jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan yang dibangun dengan biaya yang besar, nyaris tak berfungsi sebagai tempat penyeberang bagi pejalan kaki, karena orang lebih suka menggunakan jalan pintas dibawah jembatan yang jelas-jelas berbahaya bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan yang sedang melintas. Orang yang dengan patuh menggunakan jembatan penyeberangan seringkali ditertawakan, dianggap sok patuh, dan lebih-lebih lagi lagi keamanannya tidak terjamin, karena di beberapa jembatan penyeberangan ditengarai merupakan daerah rawan kejahatan. Bahwa jalan-jalan di kota besar lebih difungsikan untuk kepentingan pemilik kendaraan bermotor, ketimbang pejalan kaki, barangkali juga merupakan salah satu sebab ketidak patuhan pejalan kaki menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan.

Kejadian yang ironis terjadi di beberapa kampus perguruan tinggi. Beberapa kampus "terpaksa" membuat aturan melarang mahasiswa untuk masuk kampus pakai sandal jepit dan kaus oblong. Peraturan tersebut tidak cukup dituliskan, tetapi perlu ditambahkan gambar sandal jepit dan kaus oblong dalam ukuran besar dengan tanda silang untuk menunjukkan bahwa ada larangan untuk memakai sandal jepit dan kaus oblong. Pertanyaannya: apakah mahasiswa buta huruf?, sehingga pesan yang disampaikan tidak cukup dengan bahasa kata-kata, tetapi perlu dipertegas dengan gambar-gambar besar?

Contoh mutakhir kita dapatkan dari media massa tentang kolam renang Senayan yang terpaksa tak dapat dipakai latihan para atlet, karena dipakai mandi, cuci baju dan juga buang air besar oleh suporter sepak bola (baca: Kompas, 12 Juli 2000.). Siapapun tahu bahwa kolam renang adalah tempat berenang, bukan tempat cuci baju, mandi atau bahkan tempat buang air besar. Kita semua juga yakin bahwa disekitar fasilitas kolam renang itu pasti ada kamar mandi dan WC yang dapat dipakai sesuai fungsinya.

Di bidang pembangunan perkotaan juga kita temui fenomena tersebut. Bantaran sungai, banyak diketahui masyarakat adalah tanah negara yang berfungsi sebagai tanggul penghadang air untuk menjaga agar air tidak meluap. Fungsi tanah pinggiran sungai sebagai tanggul diperkuat dengan tulisan larangan mendirikan bangunan, dengan sanksinya sekaligus. Di hari-hari ini, di sepanjang bantaran sungai Jagir di wilayah Surabaya Timur, sepanjang aliran sungai itu, semakin sulit mencari tanah kosong, karena hampir tiap jengkal didirikan bangunan permanen, yang konon ijnnya diperoleh dari 'oknum' dinas yang berwenang dengan

harga sekitar 1-3 juta per kapling. Belum cukup ruwet persoalannya, ditambah lagi mereka yang membangun secara ilegal tersebut mendapat saluran listrik.

Dalam berbagai kasus tersebut siapa yang paling bebal? Rakyat kecil yang melihat peluang lemahnya penerapan peraturan, ataukah para oknum birokrasi yang memanfaatkan jabatannya untuk memperdayai rakyat kecil, dan tentu saja, pada gilirannya, juga merugikan negara?

Jangan dikira bahwa kebebalaan hanya monopoli pada pejabat publik yang memberikan layanan pada masyarakat saja. Virus kebebalaan juga terdapat pada kaum intelektual, yang muncul karena ego profesi dan latar belakang pendidikan. Mereka menganggap bahwa ilmu yang dimilikinya adalah yang terbaik, dan menganggap disiplin ilmu lain tidak bermanfaat. Etnosentrisme yang sempit bukan saja terjadi pada masyarakat tradisional, tetapi juga terjadi pada kaum intelektual. Simak saja pernyataan demi pernyataan kaum intelektual yang semakin sering dilontarkan setelah era reformasi bergulir lebih didominasi egoisme yang kuat dan bias-bias di antara masing-masing ahli, yang sibuk berkuat pada kebenarannya sendiri,

### **Bagaimana kebebalaan sosial mengancam persatuan bangsa?**

Kemajemukan bangsa tidak selalu harus menjadi ancaman persatuan bangsa. Kemajemukan bila dipahami secara bijak, justru merupakan suatu kekayaan budaya yang luar biasa, yang dapat saling melengkapi kebhinekaaan bangsa. Namun, mengapa kemajemukan dipermasalahkan; mengapa ada kecemburuan sosial antar suku; mengapa ada dominasi kekuasaan budaya suku yang dapat memicu konflik? Bagaimana menumbuhkan kesadaran budaya dan kearifan budaya dengan menggunakan budaya nasional sebagai pemersatu? Faktor apakah yang harus ditumbuhkan agar persatuan tidak semu, tetapi nyata dan mampu menjadi perekat bangsa? Perbedaan biarlah menjadi perbedaan untuk selamanya, bahwa adat istiadat suku Bali tidak sama dengan adat istiadat Jawa tidaklah perlu dipersoalkan, Tetapi yang harus mampu diciptakan adalah kesamaan kepentingan, yakni kepentingan yang lebih besar dari kepentingan pribadi, golongan atau sukunya., yakni kepentingan nasional..

Bhineka Tunggal Ika, menurut Ignas Kleiden (1999) mempunyai makna yang lebih dalam dari yang sering diduga. Dia mengakui heterogenitas etnik, budaya, agama, dan ras, tetapi menuntut persatuan dalam komitmen politik. Tetapi yang sering terjadi adalah keragaman etnik dan keanekaragaman budaya itu hendak dihomogenkan demi persatuan dan kesatuan. Sementara dalam politik, bangsa ini dibikin amburadul karena tidak adanya kesatuan dalam komitmen politik dan kemampuan politik. Ancaman kemajemukan dan ideologi harmoni merupakan salah satu warisan Orde Baru yang terlalu bernafsu untuk mencapai harmoni.

Semua yang berbeda dinafikan, dianggap tak ada, karena dianggap memiliki potensi konflik yang dianggap berbahaya akan mengancam stabilitas negara. Harmoni telah dikerdilkan maknanya hanya menjadi homogen semata, diseragamkan dengan dasar mitos-mitos semu yang menyesatkan. Ketertiban yang ditegakkan adalah ketertiban semu dan hanya dipermukaan saja.

Secara relatif dapat dikatakan bahwa kebalan sosial merupakan akibat dari suatu masyarakat yang dikondisikan hidup dalam situasi serba dipolakan. Semua orang puas bila mendengar jargon-jargon pembangunan, walaupun pembangunannya sendiri mungkin tak pernah ada. Namun, pada sisi lain masyarakat juga mengalami apa yang disebut dengan revolusi identitas. Sebuah perubahan mendasar dimana batas antar kelompok yang sebelumnya bersifat lunak kini mengeras dan membentuk batas-batas simbolik yang tak ternegosiasikan (Rochman Achwan, 1999). Revolusi identitas ini akan memperlemah kesadaran berbudaya. Proses yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kesadaran berbudaya yang melahirkan adanya kearifan-kearifan ditumpulkan dan dikekang dengan jargon-jargon persatuan dan kesatuan yang semu. Kehidupan menjadi seragam, rutinitas menjadi irama bahkan ritual kehidupan sehari-hari.

Dalam kondisi semacam ini masyarakat menjadi rentan dan rapuh terhadap teror-teror yang diciptakan untuk kepentingan politik maupun bisnis. Lihat saja bagaimana maraknya perkembangan media-massa yang tidak diimbangi kemampuan masyarakat untuk menyeleksi dan melakukan kontrol terpaan informasi. Situasi ketidakpastian, kebencian semu, ancaman palsu, dan bahkan kekacauan palsu pun dapat diciptakan dan dipasarkan dengan mudah. Kekacauan, kebrutalan, dan keberingasan dikendalikan oleh apa yang yang dikatakan sebagai industri besar pikiran (*great mind industry*), dan mampu menciptakan suatu masyarakat yang mayoritas yang diam (*the silent majorities*) sebagaimana disinyalir oleh Jean Baudrillard dalam *In The Shadow of The Silent Majorities* (Yasraf dan Amir Piliang, 1999).

Masyarakat yang mayoritas diam justru mengandung suatu bahaya, karena menyuburkan sikap-sikap semacam apatis, fatalistik, mistik, dan yang sejenisnya yang merupakan dasar dari kebalan sosial. Bila potret kebalan sosial dalam masyarakat sudah sedemikian buram, dan semakin memberi indikasi dampak negatif yang dapat mengancam persatuan bangsa, tentu hal semacam ini perlu dicermati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada keutuhan bangsa.

Munculnya perpecahan etnik, budaya, dan suku dalam tubuh bangsa kita yang secara relatif memicu konflik antar etnik tentu tak dapat dibiarkan berlarut-larut. Bangsa ini harus berupaya keras agar kebhinekaan yang kita banggakan tak sampai merentas simpul-simpul persatuan yang diikat dengan paham kebangsaan. Semangat kebersamaan dalam perbedaan dalam Bhineka Tunggal Ika harus dapat menjadi 'roh' penggerak setiap perilaku masyarakat.

Walaupun Glifford Geertz dalam bukunya *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, 1972 telah mengingatkan bahwa secara garis besar menunjukkan negara-negara baru di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, menghadapi masalah integrasi nasional karena penduduknya dipengaruhi adanya sentimen primordial dan adanya politik sipil yang saling tarik menarik (Thomas Sunaryo, 1999). Nampaknya kesadaran akan pentingnya paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia masih sangat terbatas, terutama di kalangan pengambil kebijakan dan para elite politik. Masih perlu terus menerus ditumbuhkan kesadaran budaya agar kepekaan menangkap situasi krisis dan upaya mencari solusi pemecahan ada pada para pengelola negara.

Penegakan supremasi hukum, merombak sistem pendidikan yang terbukti telah memasung imajinasi dan kreativitas menjadi infra-struktur pendidikan yang betul-betul dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, keteladanan dari tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi, merupakan beberapa langkah konkrit yang harus disegerakan..

### **Kebalan sebagai patologi sosial**

Kebalan dapat dikategorikan sebagai patologi sosial ketika ia telah menjadi suatu krisis sosial yang tak kunjung usai, dan telah berubah menjadi suatu gangguan patologi sosial. Bentuk-bentuk abnormal dari temperamen seperti depresi, mania, amok, paranoid, semakin mudah diamati baik secara langsung maupun sebagaimana yang ditayangkan melalui media massa.

Konsep nrimo yang banyak dijumpai dalam masyarakat Jawa merupakan salah satu bentuk adaptasi rasional, dimana dengan kebebasan penuh orang menerima halangan, kekecewaan, seperti penyakit, rintangan dan musibah yang tak dapat dihindarkan, sebagai sesuatu yang dilihat dari segi positif. Sikap nrimo pada orang Jawa didasarkan pada sikap fatalistik (Hardjowirogo, 1984). Namun, sikap nrimo yang tanpa perhitungan dan cenderung berlebihan, bisa berubah menjadi suatu bentuk pengakuan kekalahan, sikap pasif yang tidak mengarah adanya suatu upaya untuk mengatasinya, bisa mengarah pada sikap malas untuk berusaha. Sikap nrimo yang diterapkan secara berlebihan, dilakukan tanpa adanya kesadaran apalagi kebebasan, akan menjerumuskan ke arah sikap bebal, yang tentu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk adaptasi sosial yang rasional. Dalam kondisi tak berdaya biasanya orang membutuhkan pelepasan, yang ekspresinya bisa bermacam-macam. Ironi, humor atau sarkasme seringkali merupakan senjata satu-satunya bagi orang atau bangsa yang merasa terjajah, yang tidak memiliki kebebasan, benci pada penjajahan yang dialami, tetapi tidak bisa membebaskan diri. (Bouwer, dkk, 1989). Ketiganya dapat sangat cepat dan mudah dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam panggung politik misalnya, dapat dilihat bagaimana ironi, humor, atau sarkasme mewarnai

perilaku elite politik. Atas kondisi tersebut, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami schizoprenia sosial, suatu kondisi gangguan jiwa dengan kepribadian yang terbelah (Satjipto Rahardjo, 1999).

Kalau menggunakan pendekatan medis, sebenarnya kita semua sudah sakit parah, dimana bukan fisiknya yang sakit tetapi jiwanya. Yang banyak terjadi adalah gangguan jiwa dalam berbagai jenis. Gangguan jiwa jenis amok yang diteliti pada suku Melayu tahun 1940-1941 oleh van Wulffen-Palthe, ternyata masih saja ditemukan pada beberapa

wilayah di Indonesia. Kita juga dengan mudah menjumpai tipe megalomaniac paranoid, suatu istilah psikiatri mengenai penyakit jiwa yang menganggap dirinya orang hebat. Di samping itu juga sangat mudah mencari orang yang selalu curiga bahwa dirinya akan dicelakai orang (*paranoid*). Fenomena paranoid makin menggejala ketika orang dengan mudah salah paham dan mencurigai orang lain. Kasus dugaan dukun santet yang kemudian dikeroyok bahkan dibakar hidup-hidup tanpa diberi kesempatan untuk membela diri mungkin salah satu contoh kongkritnya.

Peningkatan jumlah pengguna narkoba akhir-akhir ini, juga memberi indikasi peningkatan jumlah penderita paranoid dalam masyarakat, karena penggunaan zat-zat berbahaya tersebut mengakibatkan kerusakan saraf otak, antara lain menimbulkan gangguan paranoid pada penggunanya.

### Kebebalan sebagai watak bangsa

Kebebalan sebagai watak bangsa? Tentu terlalu dini bila diambil kesimpulan semacam itu, tetapi melalui analisis dengan menggunakan beberapa teori, dapat dilihat sejauhmana kebebalan ini dipengaruhi dan mempengaruhi watak bangsa.

Penelitian tentang watak atau kepribadian suku bangsa penting artinya dalam mengenal karakteristik spesifiknya. Misalnya kepribadian orang Minangkabau, kepribadian orang Batak, kepribadian orang Jawa, hingga kebudayaan suku yang terpencil sekalipun. Mengapa? Selain dapat menjadi modal sosial untuk membangun bangsa, setidaknya potensi konflik dapat dideteksi lebih dini di tingkat masing-masing komunitas tersebut. Ketika ia harus berinteraksi dengan suku bangsa lain, apa yang biasa dikembangkan, suatu sikap penerimaan, ataukah perlawanan. Bila sikap perlawanan yang muncul, jenis perlawanan seperti apakah: perlawanan terselubung, tidak terang-terangan, tetapi mengembangkan sikap membandel bahkan bebal? Ataukah perlawanan terang-terangan yang dimunculkan dalam bentuk semacam amok?

Bagaimana sebenarnya watak bangsa kita? Benarkah gotong royong, saling tolong-menolong, selalu rukun, merupakan watak bangsa kita? Pendidikan kebangsaan yang menanamkan nasionalisme melalui 'Penataran P 4' telah gagal total menumbuhkan suatu sikap moral yang dapat menggalang persatuan. Sekian tahun telah disia-siakan untuk mendidik dan mensosialisasikan nilai-sikap Bhineka Tunggal Ika secara benar. Yang ada selama ini adalah menanamkan

nilai persatuan yang semu, yang serba permukaan, dan menafikan adanya perbedaan dengan semangat yang berlebihan pada upaya penyeragaman. Watak bebal lebih merupakan watak bangsa yang berhubungan dengan watak kebudayaan (*cultural character*), watak masyarakat (*social character*), ataukah merupakan kepribadian dasar (*basic personality*), sebagaimana yang pengelompokkan yang dilakukan oleh Milton Singer (Danandjaja, 1988). Sudah saatnya untuk mengkaji lebih mendalam watak berbagai etnik yang ada di Indonesia untuk dipakai sebagai upaya pemecahan masalah. Apabila kebudayaan secara utuh telah dipahami bersama, dan dijadikan acuan semua pihak, maka potensi nilai-nilai kebudayaan untuk menjalin persatuan menjadi sangat dimungkinkan. Dalam kondisi semacam itu, sangat mungkin ditumbuhkan kembali kearifan budaya yang dimiliki setiap kebudayaan untuk merajut kembali persatuan bangsa yang sedang terkoyak. Apabila ada kesepakatan tentang pentingnya nilai kearifan budaya, sebagai upaya perekat bangsa, maka ini berarti suatu penghargaan terhadap modal bangsa yang paling hakiki, yang selama ini dilupakan. Persoalannya apakah wujud kearifan budaya yang dimiliki bangsa ini? Dibutuhkan adanya suatu kearifan yang berlaku lintas budaya, yang dapat menjalin keragaman budaya yang ada. Belajar dari kearifan budaya yang ada merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam rangka menyongsong era otonomi daerah. Ketika UU no. 22 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, perlu upaya menggali potensi sumberdaya dan lembaga-lembaga lokal yang ada sebagai kekuatan masing-masing daerah. Misalnya, kita dapat mempelajari apakah yang membuat pranata Banjar di Bali dapat menjadi sumber rujukan penyelesaian konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Kita juga dapat menggali bagaimana tradisi jimpitan beras di Jawa Tengah dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam suatu komunitas.

Belajar dari kearifan tradisional yang ada pada berbagai kebudayaan tentu dapat dipakai untuk menganalisis apakah watak bebal merupakan persoalan budaya, masyarakat, ataukah persoalan individu. Faktor-faktor apakah yang menumbuh-kembangkan sifat dan sikap bebal? Merupakan tantangan bagi ilmu antropologi bersama disiplin ilmu yang lain di masa depan adalah melakukan kajian secara komprehensif tentang watak suku-suku bangsa yang ada serta berbagai kearifan budaya yang dapat digali, untuk dapat dijadikan bahan kajian para perencana pembangunan.

### Menuju Indonesia baru: merajut persatuan yang terkoyak

Tercabik-cabiknya persatuan bangsa dan negara ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Keprihatinan saja tak cukup untuk dapat mengubah kondisi yang ada. Perlu langkah konkrit, dimana untuk mencari pemecahan masalah harus dilihat dulu akar permasalahannya. Jelas bahwa upaya mengatasi masalah yang sedang mengancam keutuhan

bangsa ini tidak cukup hanya disikapi secara partial, apa lagi bila hanya dibicarakan dalam acara seminar dan talk-show saja. Apakah Forum Rembug Nasional yang diadakan di Bali beberapa waktu yang lalu dapat memberikan solusi pemecahan yang jitu? Semuanya perlu diuji dan waktu pula yang akan membuktikan. Bila kita sepakati bahwa permasalahan bangsa ini kompleks, maka tentu menyikapinya juga tidak dapat dilakukan secara sepotong demi sepotong saja. Perlu dilakukan suatu upaya yang komprehensif dengan pendekatan holistik. Prinsip yang mendasar dalam pendekatan holistik adalah bahwa tidak ada satu gejala apa pun yang dapat berdiri sendiri serta dapat menjelaskan dirinya sendiri (Suparlan 1997).

Bagaimana ilmu antropologi dapat berperan? Sebagai ilmu pengetahuan yang berisikan konsep-konsep dan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan makna dari gejala-gejala dan hakekat hubungan di antara gejala-gejala yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, secara sadar atau tidak sadar banyak ahli dari bidang ilmu pengetahuan lainnya telah menggunakan konsep dan teori antropologi untuk menjelaskan berbagai masalah sosial yang relevan (Suparlan 1997). Studi-studi etnografi yang dilakukan oleh para ahli antropologi pembangunan, perlu disinergikan dengan penelitian pada disiplin ilmu lain untuk mendapat kesamaan titik pandang dalam menyikapi berbagai fenomena dalam masyarakat, termasuk fenomena kekebalan sosial. Sebagai bangsa kita tidak akan mampu menghadapi tantangan global, bila kita sendiri masih sibuk bertikai antar saudara yang hanya membentuk kondisi kontra produktif, dan merugikan keutuhan bangsa. Keberadaan jurusan Antropologi pada sepuluh Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan peluang dan tantangan yang harus diraih bersama untuk mengatasi berbagai kemelut yang dialami bangsa ini. Reformasi bidang pendidikan merupakan salah satu faktor keniscayaan dengan memasukkan paradigma akal budi sebagai dasar pemikiran dalam menyusun kurikulum maupun metode belajar-mengajar.

Salah satu tugas yang mendesak adalah menumbuhkan social trusts dan social control di kalangan masyarakat yang multi-kultural, untuk menjernihkan dan mencairkan komunikasi budaya yang tersumbat. Pembangunan harus dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tidak hanya secara ekonomi dengan indikator-indikator keberhasilan secara fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa indikator non-fisik yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan, antara lain dapat dilihat pada: (i) kualitas kepribadian, (ii) kualitas bermasyarakat, (iii) kualitas bernegara, (iv) kualitas berbangsa, (v) kualitas berkarya, dan (vi) kualitas religiusitas (Masri Singarimbun 1997).

Melalui beberapa studi akan dapat dilihat bagaimanakah sebenarnya kualitas bangsa kita dari ke enam indikator tersebut? Dengan modal sosial semacam itu, apakah kita

mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global, dimana pada saat yang sama kita masih menghadapi persoalan internal yang tak kunjung usai. Rembug nasional harus dilanjutkan dengan langkah-langkah yang dapat diteladani, dengan semangat kebersamaan di atas perbedaan secara menyeluruh dari semua pihak. Apa pun langkah konkrit yang diupayakan, oleh siapa pun, dan dimana pun, harus dilandasi suatu semangat untuk merajut kembali persatuan bangsa yang telah terkoyak dan tercabik-cabik disana-sini. Kondisi kritis dimana kita semua tenggelam dalam kebodohan dan mengalami proses pembebalan harus segera diakhiri dengan suatu komitmen politik yang kuat pada semua pelaku, baik pada mereka yang duduk di pemerintahan, legislatif, maupun masyarakat sipil, dengan menerapkan paradigma akal budi.

Adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama kemana bangsa dan negara ini mau diarahkan, menjadi bangsa besar yang diperhitungkan bangsa dan negara lain? Ataukah menjadi bangsa terpuruk yang semakin tenggelam dalam proses pembodohan yang akan menghancurkan diri sendiri?

### Penutup

Uraian di atas lebih merupakan permenungan dari kenyataan sehari-hari yang memiriskan. Dengan bertolak dari berbagai pemikiran, dapat ditarik simpulan sementara - sebagai penutup - tentang fenomena kekebalan sosial sebagai berikut:

- (a) Bahwa kekebalan sosial bukan merupakan fenomena tunggal, yang berdiri sendiri. Ia bisa merupakan peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Mudah-mudahan tidak terlalu dini jika dikatakan bahwa fenomena kekebalan sosial adalah masalah kebudayaan yang terkait dengan berbagai peristiwa perubahan kebudayaan yang dialami masyarakat.
- (b) Melalui batas sejarah, pra-reformasi dengan pasca-reformasi - jika dapat disebut demikian -- berbagai tekanan dalam kehidupan masyarakat pra-reformasi telah menjadikan masyarakat memiliki bekal yang berlebih dalam mengungkapkan kekebalan di dalam situasi pasca-reformasi yang secara umum terasa tanpa-tanggungjawab, tanpa-batas dan bercirikan akhlak-yang-tidak-terpuji.
- (c) Kebijakan pemerintahan yang tidak terfokus dengan prioritas yang tajam dan cenderung memapankan ideologi dominan dari kelompok yang berkuasa telah menimbulkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara masyarakat dan para elite kekuasaan. Penguasaan atas rakyat di dalam segala bidang kehidupan (politik, sosial, pendidikan, kesehatan, KB) membuat mereka tidak berdaya.
- (d) Perlu dilakukan penelitian mendalam apakah kekebalan sosial merupakan hasil proses interaksi yang membuahkan konflik, merupakan dampak keterkejutan budaya, ataukah merupakan watak bangsa yang muncul



- ketika ada pemicunya?
- (e) Budaya bisu pada masyarakat mayoritas yang diam, menyimpan berbagai persoalan latent, terpendam, dan sewaktu-waktu bisa meledak, merupakan lahan yang menyuburkan tumbuhnya kebalan dalam masyarakat.
- (f) Homogenitas nilai-nilai kebudayaan yang dilakukan oleh kekuasaan pemerintah telah membuat masyarakat menjadi rentan dan rapuh terhadap teror-teror. Untuk itu, kemajemukan budaya sebagai kekayaan bangsa perlu direkonstruksi antara lain melalui perubahan sistem pendidikan.
- (g) Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan masih relevan karena pada dasarnya ia mengakui heterogenitas yang mengakui adanya perbedaan etnik, ras, kebudayaan, dan agama. Bhineka Tunggal Ika harus dapat difungsikan sebagai roh penggerak perilaku masyarakat dan bukan sebagai mitos belaka.
- (h) Fenomena kebalan sosial bisa menyuburkan potensi disintegrasi bangsa bila tidak disikapi secara arif. Dibutuhkan penggalian kearifan budaya yang dimiliki setiap etnik untuk menumbuh-kembangkan suatu kesadaran kolektif yang dapat meredam bahkan menghilangkan kebalan sosial.
- (i) Ilmu Antropologi, khususnya Antropologi Pembangunan mempunyai peran dan sekaligus tanggung jawab yang berat dalam mengatasi permasalahan yang mengancam persatuan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang juga melibatkan berbagai disiplin ilmu lain agar dapat mendesak pada penguasa untuk memasukkan perspektif budaya dalam perencanaan pembangunan..
- Kepustakaan**
- Achwan, Rachman  
1999 Ditepi Jurang Revolusi Identitas, dalam Frans Parera & T. Jakob Koekeris (eds) *Demokrasi & Otonomi: mencegah Disintegrasikan Bangsa*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Brouwer M.A.W. dkk.  
1989 *Kepribadian dan Perubahannya*. Cetakan keenam Jakarta: PT Gramedia.
- Budhisantoso, S.  
1997 'Pembangunan Nasional Indonesia dengan Berbagai Persoalan Budaya dalam Masyarakat Majemuk', dalam Masinambow E.K.M. (eds), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Danandjaja, James  
1988 *Antropologi Psikologi: Teori, Metode dan sejarah Perkembangannya*. Jakarta: PT Rajawali.
- Haryadi  
2000 Kebealan Pejabat Negara dalam Perspektif Ekonomi-Politik, makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional 'Kebealan Sosial, Otonomi daerah, dan Perspektif Usaha Kesejahteraan Sosial', diselenggarakan BK3S Jawa-Timur, Surabaya 28-29 Maret 2000.
- Hardjowirogo Marbangun  
1984 *Manusia Jawa*. Jakarta: PT Intidayu Press.
- Ibrahim Idy Subandy & Dedy Djamaludin Malik (eds)  
1997 Pengantar editor: 'Mencerahkan Akal Budi dalam sangkar Hegemoni', dalam *Hegemoni Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia  
1989 Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
- Kleiden, Ignas  
1999 Stratifikasi Etnis & Diskriminasi, dalam Frans Parera & T. Jakob Koekeris (eds), *Demokrasi & Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Koentjaraningrat  
1988 'Penelitian Antropologi Terhadap 1988 Masalah Masyarakat Multi-etnik dan Kesatuan Nasional', dalam Harsja W. Bachtiar, dkk. (eds), *Masyarakat dan Kebudayaan, Kumpulan karangan untuk Prof. Dr. selo Soemardjan*. Jakarta: PT. Penerbit Jambatan.
- Latif Yudi & Idy Subandy Ibrahim  
1997 'Media Massa dan Pemiskinan Imajinasi Sosial', dalam Idy Subandy Ibrahim & Dedy D. malik (eds), *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Masinambow E.K.M. (eds)  
1997 *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. diterbitkan oleh Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto  
1999 'Perilaku Gugat Menggugat', dalam Frans Parera & T. Jakob Koekeris (eds), *Demokrasi & Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Saptandari, Pinky  
2000 Watak bangsa dan Potensi Disintegrasi, makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional 'Kebealan Sosial, Otonomi Daerah, dan Perspektif Usaha Kesejahteraan Sosial', diselenggarakan BK3S Jawa Timur, Surabaya 28-29 Maret 2000.

Siswanto, Andi

- 1999 'Membangun Komunitas mengatasi krisis', dalam Frans Parera & T. Jakob Koekeris (eds), *Demokrasi & Otonomi : Mencegah Disintegrasi Bangsa*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Suparlan, Parsudi

- 1997 'Antropologi dan pembangunan', dalam Masinambow E.K.M. (eds), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.

Singarimbun, Masri

- 1997 *Penduduk dan Perubahan*. Jakarta: PT Gramedia

Sunaryo, Thomas

- 1999 'Primordialisme, Kekerasan, dan Integrasi Nasional', dalam *Demokrasi & Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Yasraf dan Amir Piliang

- 1999 'Dekonstruksi Kultural Orde Baru dan Masa Depan Bangsa, dalam Frans Parera & T. Jakob Koekeris (eds), *Demokrasi & Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Yusmar, Yusuf

- 1991 *Psikologi Antar Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.